

# **Deskripsi dan Analisis APBD 2010**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

**Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah**  
Jl. Dr. Wahidin No.1 Gedung Sutikno Slamet Lantai 19, Jakarta 10710  
Tlp. (021) 3506456, 34357938, Fax. (021) 3506546, 3505103  
Website : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

# Kata Pengantar

Penyelenggaraan pemerintahan, baik oleh Pusat maupun Daerah mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan fungsi dan peran sebagai motivator dan fasilitator pembangunan tersebut, pemerintah telah mengambil suatu pilihan kebijakan untuk lebih mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diharapkan agar pemerintahan di level yang paling dekat dengan masyarakat mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Guna mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan, Pemerintah telah dan akan terus mendukung pendanaan melalui mekanisme transfer ataupun pola pendanaan lainnya. Dukungan pendanaan tersebut telah dibuktikan dengan besarnya dana APBN yang disalurkan ke daerah, baik melalui skema desentralisasi maupun skema lainnya, seperti dekonsentrasi, tugas pembantuan, subsidi, bantuan tunai, dana stimulus fiskal, dll.

Dana yang besar yang telah dan akan digulirkan melalui skema desentralisasi serta dana yang memang bersumber dari daerah sendiri (seperti pajak daerah dan retribusi daerah), selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam APBD dan pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di daerah. Pada dasarnya tidak ada lagi mekanisme pertanggungjawaban APBD kepada Pemerintah Pusat, namun hanya berupa penyampaian data APBD kepada Pusat untuk keperluan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Dari data yang disampaikan melalui SIKD inilah kemudian disusun informasi dan analisis atas APBD seluruh Indonesia. Informasi dan analisis APBD berguna untuk memberikan gambaran yang menyeluruh namun ringkas mengenai situasi dan kondisi keuangan daerah saat ini. Potret APBD yang informatif dan akurat selanjutnya dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kami mengharapkan agar buku "Deskripsi dan Analisis APBD 2010" ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Besar harapan kami, agar buku ini dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengambilan kebijakan sehingga tujuan dan cita-cita otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat terwujud.

Dirjen. Perimbangan Keuangan,

Mardiasmo

# Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b>	1
<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	4
<b>Gambaran Umum</b>	6
▪ Pendahuluan	7
▪ Gambaran Umum APBD 2010 – Nasional	9
▪ Gambaran Umum APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota	10
<b>Pendapatan Daerah</b>	11
▪ Pendapatan Daerah	12
▪ Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional	13
▪ Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi	14
▪ Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota	15
▪ Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota	16
▪ Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Provinsi	17
▪ Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Pemerintah Kabupaten/Kota	18
▪ Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)	19
<b>Belanja Daerah</b>	20
▪ Belanja Daerah	21
▪ Komposisi per Jenis Belanja	22
▪ Tren Belanja APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)	23
▪ Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Provinsi)	24
▪ Tren Belanja APBD 2007-2010 (Pemerintah Kabupaten/Kota)	25
▪ Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)	26
<b>Surplus/Defisit APBD</b>	27
▪ Surplus/Defisit APBD	28
▪ Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang	29
▪ Daerah Yang Melebihi Batas Defisit	30
▪ Tren Defisit APBD Tahun 2007-2010	31
▪ Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)	32
<b>Pembiayaan Daerah</b>	33
▪ Pembiayaan Daerah	34
▪ Komposisi Pembiayaan	35
▪ Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010	36
▪ Tren SILPA APBD Tahun 2007-2010	37
▪ Perbandingan Penerimaan Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)	38
▪ Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan di 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)	39
<b>Indikator Keuangan Daerah</b>	40
▪ Indikator Keuangan Daerah	41
▪ Debt Service Coverage Ratio	42
▪ Debt Service Coverage Ratio per wilayah	43
▪ Indikator Ruang Fiskal Daerah (Trend DSCR 2007-2010)	44
▪ Indikator Ruang Fiskal Daerah Per Wilayah (Trend DSCR 2007-2010 Per Wilayah)	45
<b>Ucapan Terima Kasih</b>	46
<b>Lampiran</b>	47

# Ringkasan Eksekutif

- APBD 2010 menunjukkan bahwa secara nominal seluruh komponen pendapatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun secara persentase kontribusi Dana Perimbangan terus mengalami penurunan, sementara PAD mengalami sedikit peningkatan.
- Komposisi PAD di Kabupaten/Kota relatif masih sangat rendah (8%), naik dari tahun sebelumnya 7%. Sementara komponen yang sangat dominan di Kabupaten/Kota adalah Dana Perimbangan yang mencapai 82%. Hal ini berbeda secara signifikan dengan kondisi Provinsi, dimana kontribusi PAD sangat tinggi mencapai 46%, sementara Dana Perimbangan justru sedikit dibawahnya yaitu sebesar 44%.
- Apabila dibandingkan antar wilayah, komposisi PAD dalam pendapatan APBD lebih kuat di wilayah Jawa-Bali, sementara di wilayah lain komposisi PAD masih relatif lebih rendah.
- Di sisi belanja, secara agregat (Prov./Kab./Kota), belanja pegawai sangat mendominasi hingga mencapai 45% dari total belanja, diikuti oleh Belanja modal 22%. Gambaran yang berbeda terjadi antara Provinsi dengan Kab/Kota, dimana untuk Provinsi, komposisi belanja pegawai hanya mencapai 26% diikuti belanja modal 23%. Sementara untuk Kab/Kota, belanja pegawai mencapai lebih dari 51% belanja dan belanja modal hanya berkisar 21%.
- Secara nominal maupun persentase, dalam 4 tahun terakhir belanja pegawai terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di sisi lain, persentase belanja modal terus turun dalam 4 tahun terakhir, bahkan untuk tahun 2010, secara nominal belanja modal juga turun dari tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir.
- Apabila dibandingkan antar wilayah, maka belanja pegawai sangat dominan di wilayah Jawa-Bali dan Sulawesi, sementara untuk wilayah Kalimantan dan Papua-Papua Barat relatif seimbang antara belanja pegawai dengan belanja modal.

# Ringkasan Eksekutif

- Sebagian besar daerah menganggarkan defisit (450 daerah atau 86% dari keseluruhan daerah). Secara agregat (Prov./Kab./Kota), total defisit di tahun 2010 mencapai Rp40,4 triliun. Angka ini lebih kecil dari defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp47,7 triliun. Penurunan agregat defisit ini terutama karena terjadinya penurunan defisit Kab/Kota, sementara defisit Provinsi justru mengalami kenaikan.
- Penurunan defisit yang cukup signifikan di Kabupaten/Kota terjadi terutama karena sebagian besar daerah mengurangi belanja modal mereka secara signifikan (turun dari Rp88 triliun di tahun 2009 menjadi Rp69 triliun di tahun 2010 → penurunan sebagai akibat pengalihan belanja modal DAK Pendidikan ke Belanja Hibah DAK Pendidikan tidak akan lebih dari Rp9 triliun, sehingga penurunan belanja modal sendiri pada dasarnya mencapai Rp10 triliun).
- Sebagian besar daerah Kabupaten/Kota tidak dapat meningkatkan belanja modal mereka melalui pembiayaan daerah karena perkiraan SiLPA mereka juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan (turun dari Rp40,8 triliun di tahun 2009 menjadi Rp31,6 triliun di tahun 2010). Di sisi yang lain, daerah juga tidak dapat menurunkan belanja pegawai mereka yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp153 triliun di tahun 2009 menjadi Rp168 triliun di tahun 2010.
- Di sisi pembiayaan, meskipun besaran SiLPA cenderung turun, namun SiLPA masih tetap mendominasi penerimaan pembiayaan daerah (hampir 90% dari total penerimaan pembiayaan). Pinjaman daerah relatif masih sangat terbatas, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam besaran pembayaran pokok hutang daerah dari tahun ke tahun.
- Dengan semakin beratnya beban belanja pegawai (terutama gaji PNSD), maka kemampuan keuangan daerah pada dasarnya semakin turun. Dengan menggunakan indikator Ruang Fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ternyata ruang fiskal daerah semakin turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan persentase ruang fiskal terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

# Gambaran Umum

# Pendahuluan

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- **Penyusunan APBD** memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemerintah Daerah serta sinkronisasi dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.
- **APBD** terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS). Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- **APBD Tahun Anggaran 2010** seluruh daerah di Indonesia yang dianalisis dalam buku ini meliputi 522 daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 93 kota.

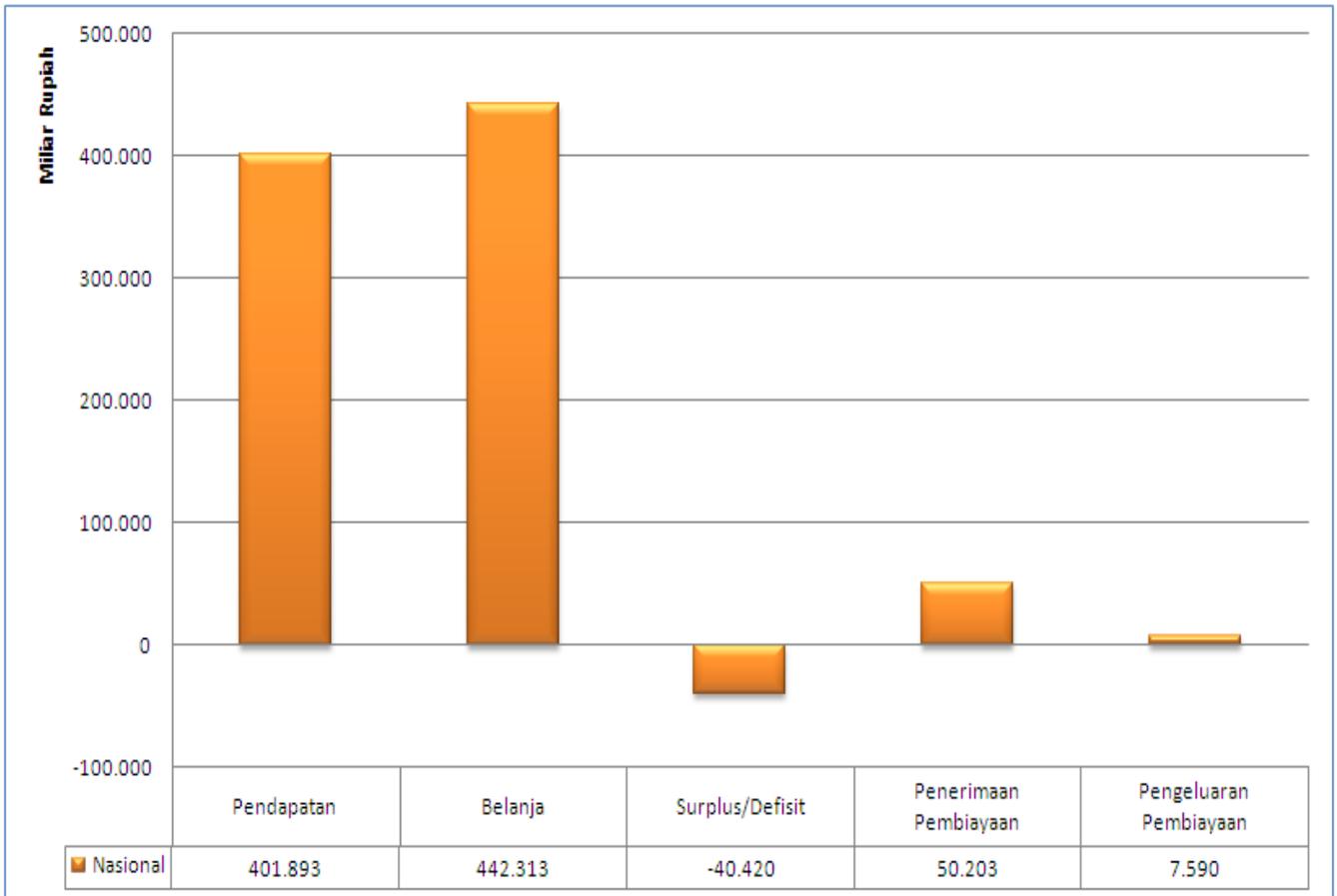
# APBD 2010

Dalam miliar Rupiah

Mata Anggaran	Jumlah Anggaran			
	Prov/Kab/Kota	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>Pendapatan</b>	<b>401,893</b>	<b>102,318</b>	<b>241,870</b>	<b>57,705</b>
Pendapatan Asli Daerah	71,799	47,331	16,422	8,046
Dana Perimbangan	291,277	45,024	204,204	42,049
Lain-lain Pendapatan yang Sah	38,817	9,964	21,244	7,609
<b>Belanja</b>	<b>442,313</b>	<b>113,133</b>	<b>264,057</b>	<b>65,122</b>
Pegawai	198,068	29,838	134,412	33,818
Barang dan jasa	81,771	26,872	42,602	12,297
Modal	95,762	26,307	55,518	13,936
Lain-lain	66,711	30,116	31,525	5,070
<b>Pembiayaan</b>	<b>42,613</b>	<b>12,866</b>	<b>22,737</b>	<b>7,010</b>
Penerimaan	50,203	14,842	27,490	7,871
Pengeluaran	7,590	1,975	4,753	861

Sumber data: SIKD (APBD 522 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)

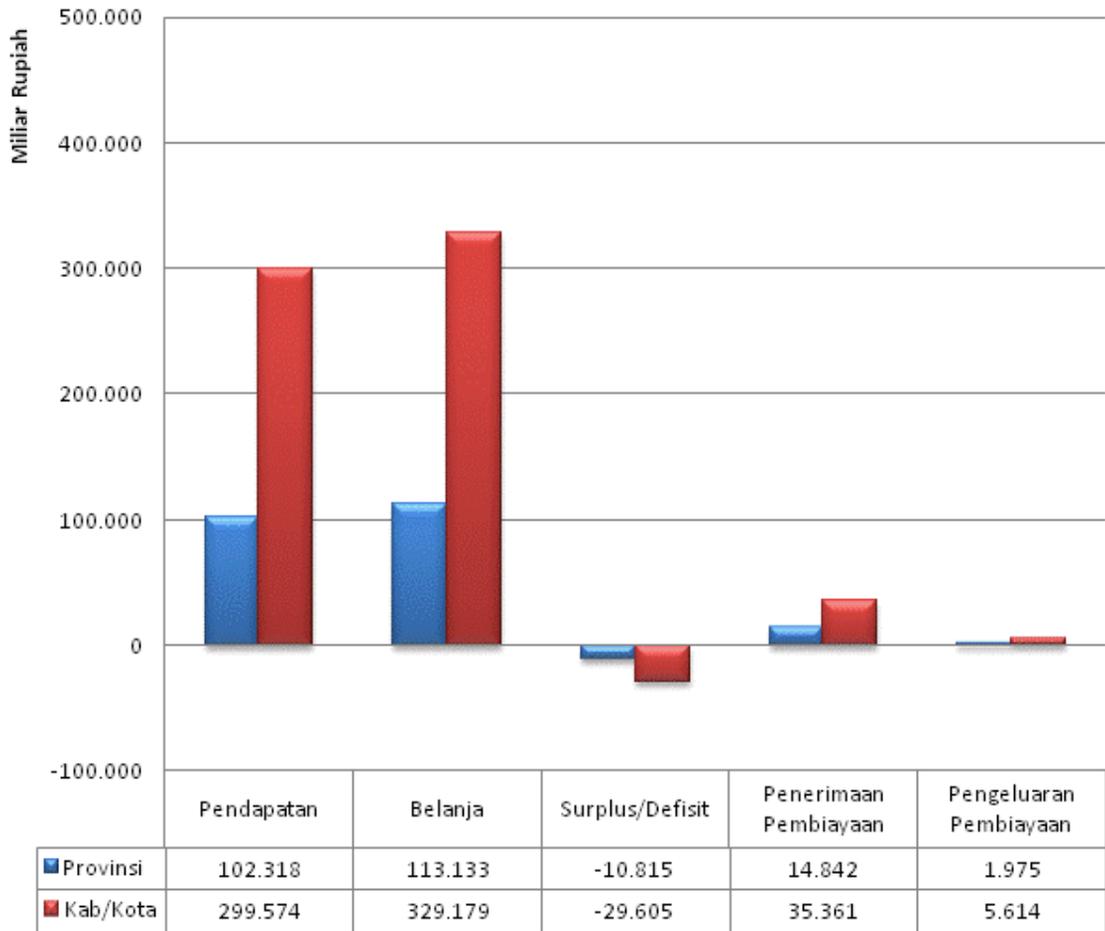
# Gambaran Umum APBD 2010 Nasional



- Berdasarkan data APBD 2010 dari 522 daerah dapat diketahui bahwa secara nasional (agregat Prov./Kab./Kota) jumlah Pendapatan Daerah sebesar Rp401,9 triliun, sementara jumlah Belanja mencapai Rp442,3 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp40,4 triliun.
- Untuk membiayai defisit tersebut, dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp50,2triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7,6triliun .

# Gambaran Umum APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota

APBD 2010 Provinsi dan Kabupaten/Kota



- Seluruh daerah Provinsi pada tahun 2010 menganggarkan Pendapatan sebesar Rp102,3 triliun, dengan Belanja sebesar Rp113,1 triliun.
- Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp10,8 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp14,8 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2,0 triliun.
- Sedangkan secara agregat Kabupaten/Kota menganggarkan Pendapatan sebesar Rp299,6 triliun dengan Belanja sebesar Rp329,2 triliun.
- Defisit yang terjadi yaitu sebesar Rp29,6 triliun akan dibiayai dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp35,4 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5,6 triliun.

# Pendapatan Daerah

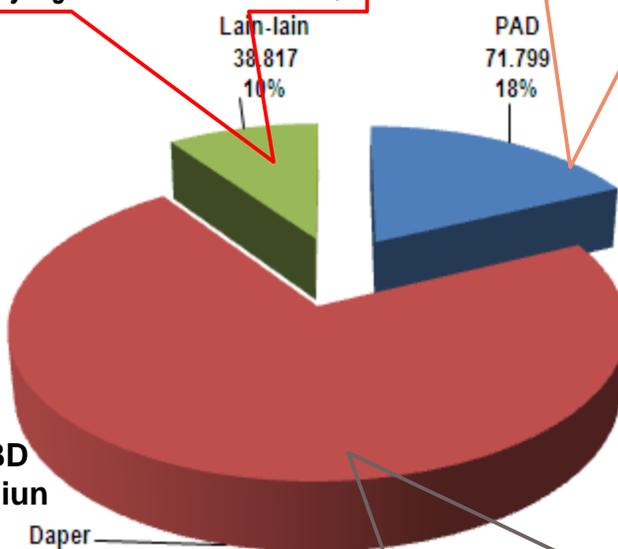
# Pendapatan Daerah

- **Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.**
- **Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :**
  - **Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.**
  - **Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.**
  - **Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.**

# Komposisi per Jenis Pendapatan Secara Nasional (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam miliar rupiah

<i>Pendapatan Hibah</i>	4.247,6
<i>Dana darurat</i>	371,1
<i>DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya</i>	11.947,8
<i>Dana penyesuaian dan otonomi khusus</i>	15.437,4
<i>Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya</i>	4.942,6
<i>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</i>	1.870,3

<i>Pajak daerah</i>	47.674,1
<i>Retribusi daerah</i>	8.010,1
<i>Hasil P.K.D yang dipisahkan</i>	3.636,0
<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	12.479,0



**Total Pendapatan APBD Nasional: Rp.401,8 triliun**

Note:  
*non-consolidated*  
(tidak mengeluarkan reciprocal account Prop – Kab/Kota)

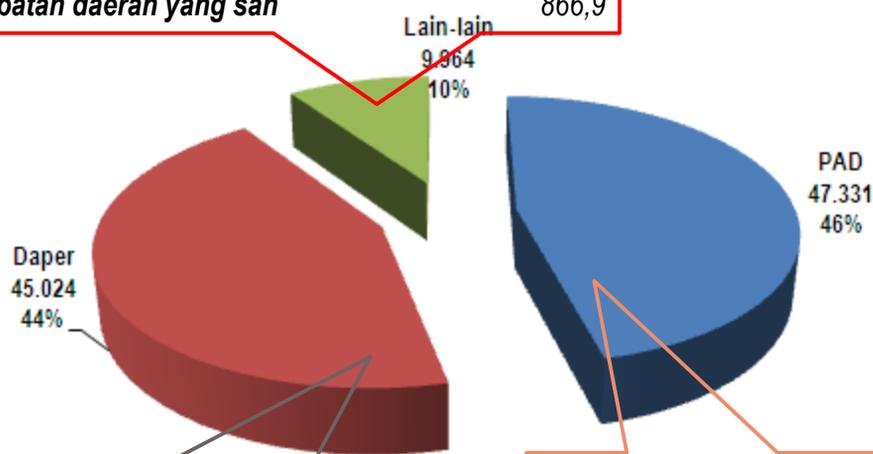
<i>Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak</i>	77.606,4
<i>Dana alokasi umum</i>	192.408,9
<i>Dana alokasi khusus</i>	21.261,4

- Total Pendapatan pada APBD 2010 secara nasional mencapai Rp401,9 triliun. → terdiri dari Rp102,3 triliun Pendapatan Pemerintah Provinsi (25,5%) dan Rp299,6 triliun Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (74,5%)
- Pendapatan Daerah secara Nasional didominasi oleh Dana Perimbangan yg mencapai Rp291,3 triliun (72%)
- Sedangkan PAD dan Pendapatan Lain-Lain masing-masing Rp71,8 triliun (18%) dan Pendapatan Lain-Lain Rp38,8 triliun (10%)

# Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Provinsi (dalam miliar rupiah)

<i>Pendapatan Hibah</i>	469,1
<i>Dana darurat</i>	0
<i>DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya</i>	103,2
<i>Dana penyesuaian dan otonomi khusus</i>	8.413,6
<i>Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya</i>	110,8
<i>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</i>	866,9

**Total Pendapatan Provinsi:  
Rp102,3 triliun**



<i>DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak</i>	24.950,5
<i>Dana alokasi umum</i>	19.299,0
<i>Dana alokasi khusus</i>	774,4

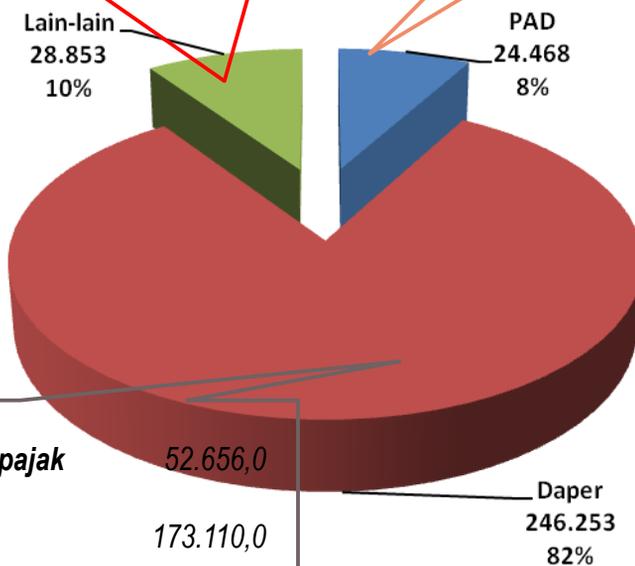
<i>Pajak daerah</i>	39.575,1
<i>Retribusi daerah</i>	1.429,8
<i>Hasil P.K.D yang dipisahkan</i>	1.748,7
<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	4.577,4

- Total Pendapatan Pemerintah Provinsi 2010 mencapai Rp102,3 triliun
- Komposisi Pendapatan antara PAD dan Dana Perimbangan cukup berimbang, yaitu PAD sebesar Rp.47,3 triliun (46%) dan Dana Perimbangan Rp.45 triliun (44%).
- Sisanya sebesar Rp.9,96 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan, yang termasuk Dana Otsus dan Penyesuaian

# Komposisi per Jenis Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota (dalam miliar rupiah)

<i>Pendapatan Hibah</i>	3.778,4
<i>Dana darurat</i>	371,1
<i>DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya</i>	11.844,6
<i>Dana penyesuaian dan otonomi khusus</i>	7.023,8
<i>Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya</i>	4.831,8
<i>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</i>	1.003,4

<i>Pajak daerah</i>	8.099,0
<i>Retribusi daerah</i>	6.580,3
<i>Hasil P.K.D yang dipisahkan</i>	1.887,2
<i>Lain-lain PAD yang sah</i>	7.901,7

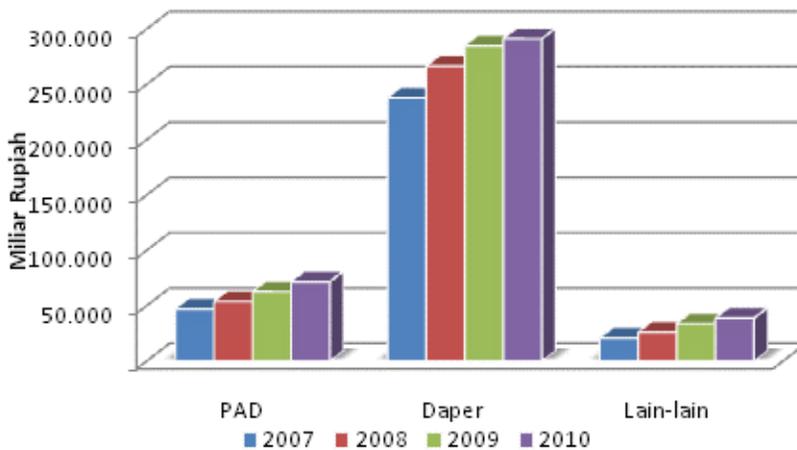


<i>DBH Pajak/bagi hasil bukan pajak</i>	52.656,0
<i>Dana alokasi umum</i>	173.110,0
<i>Dana alokasi khusus</i>	20,486,997

- Total Pendapatan Kab./Kota 2010 mencapai Rp299,6 triliun
- Pendapatan Kab./Kota didominasi oleh Dana Perimbangan yang mencapai Rp246,3 triliun (82%),
- PAD relatif masih sangat kecil yaitu hanya mencapai Rp24,5 triliun (8%), sementara sisanya sebesar Rp28,9 triliun (10%) adalah Lain-lain Pendapatan, yang termasuk Dana Penyesuaian, hibah, Dana Darurat dll.

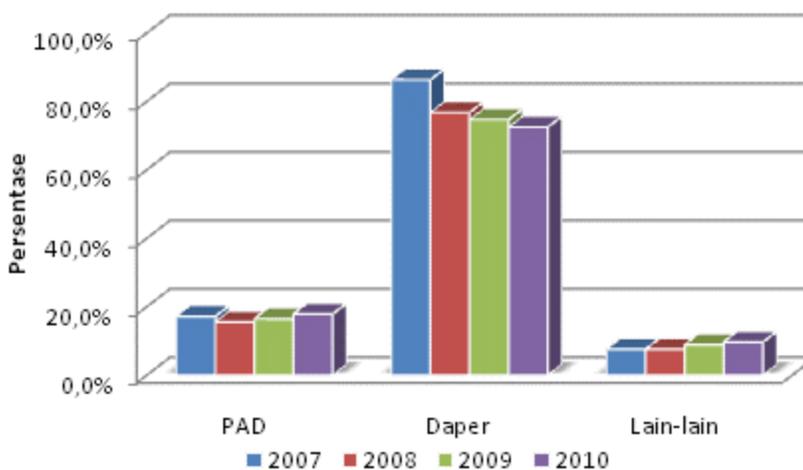
# Tren Pendapatan APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tren Pendapatan APBD secara Nasional



- Tren Pendapatan APBD Agregat Prov./Kab./Kota 2007-2010 secara nominal menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masing-masing Kelompok Pendapatan.
- Komposisi Pendapatan pada setiap tahun selalu didominasi oleh Dana Perimbangan

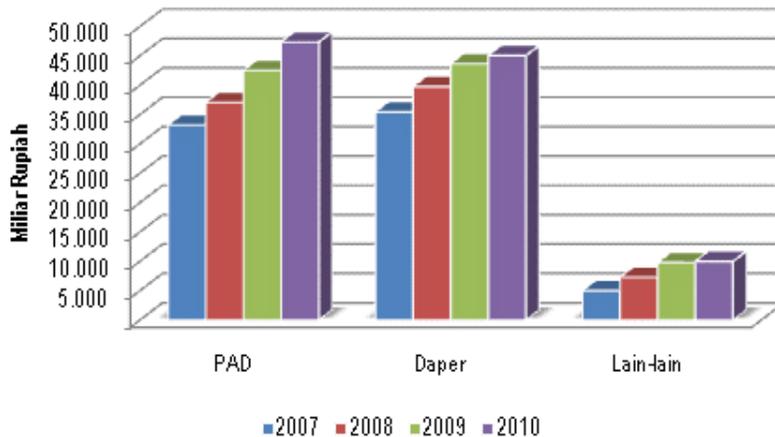
Tren Pendapatan APBD secara Nasional (%)



- Meskipun secara nominal naik, namun Tren Dana Perimbangan secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun.
- Sebaliknya PAD dan Lain-lain Pendapatan secara persentase terdapat peningkatan pada setiap tahun walaupun tidak cukup besar.

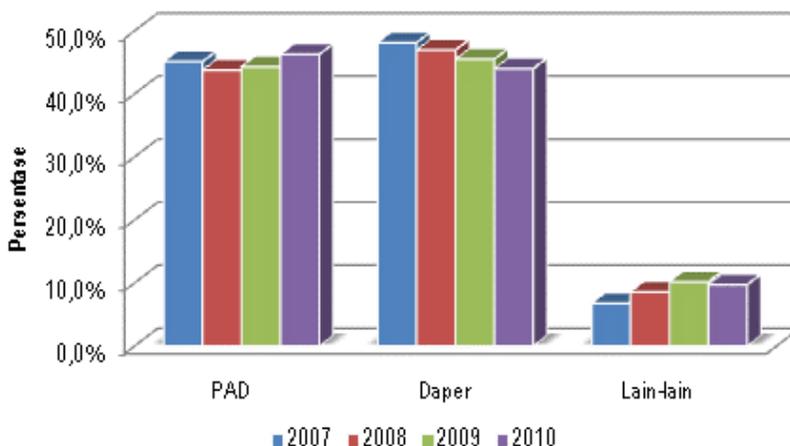
# Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Provinsi

Tren Pendapatan Provinsi



- Tren Pendapatan Provinsi 2007-2010 secara nominal juga selalu menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masing-masing Kelompok Pendapatan.
- Komposisi Pendapatan dari tahun ke tahun cukup berimbang antara PAD dan Daper

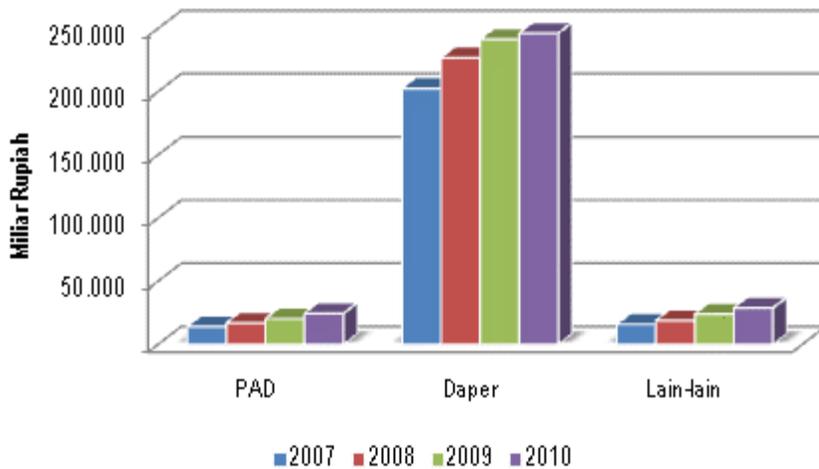
Tren Pendapatan Provinsi (%)



- Tren Pendapatan Provinsi 2007-2010 pada kelompok Dana Perimbangan secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun.
- Sementara PAD dari tahun 2007 ke 2008 mengalami penurunan dan kemudian naik kembali pada tahun 2009 dan 2010
- Kelompok Lain-Lain secara persentase mengalami kenaikan pada setiap tahun tetapi turun pada tahun 2010.

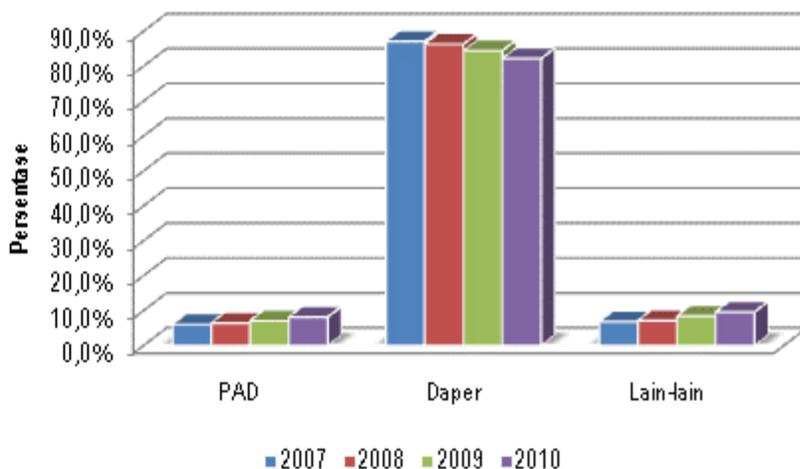
# Tren Pendapatan APBD 2007-2010 Kabupaten/Kota

Tren Pendapatan Kab.Kota



- Pada Tren Pendapatan Kab./Kota, secara nominal menunjukkan adanya kenaikan pada setiap tahun dari masing-masing Kelompok Pendapatan.
- Komposisi Pendapatan Kab./Kota, pada setiap tahun selalu didominasi oleh Dana Perimbangan

Tren Pendapatan Kab.Kota (%)

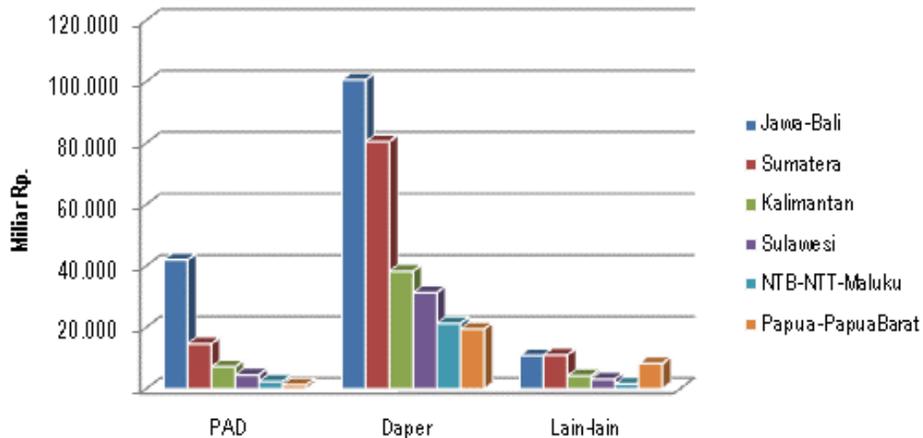


- Tren Dana Perimbangan 2007-2010 secara persentase menunjukkan adanya penurunan setiap tahun.
- Seiring dengan penurunan Daper, persentase kelompok PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya.

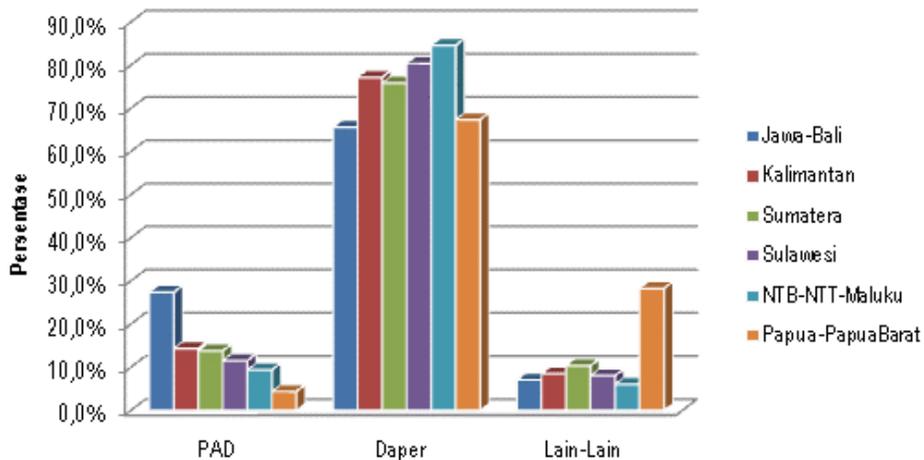
- Sama seperti kelompok PAD, pada kelompok Lain-Lain secara persentase juga mengalami kenaikan setiap tahun.

# Perbandingan Pendapatan APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

Komposisi Pendapatan pada 6 wilayah (Nominal)



Komposisi Pendapatan pada 6 wilayah (%)



- Secara nominal, wilayah Jawa dan Bali mempunyai pendapatan APBD tertinggi pada dua kelompok pendapatan utama (PAD dan Daper), mengingat jumlah Kabupaten dan Kota di wilayah ini adalah yang terbesar. Sementara untuk kelompok Lain-lain Pendapatan, wilayah Sumatera dan Papua cukup tinggi, mengingat di kedua wilayah tersebut terdapat Otsus.
- Secara persentase, meskipun dominasi Daper terjadi di seluruh wilayah, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pola komposisi Pendapatan pada ke-6 wilayah. Persentase PAD di wilayah Jawa dan Bali relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sementara persentase Daper justru yang terendah dibandingkan wilayah lain.
- Persentase tertinggi untuk Daper terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, sementara persentase tertinggi untuk kelompok Lain-lain Pendapatan terjadi di wilayah Papua.

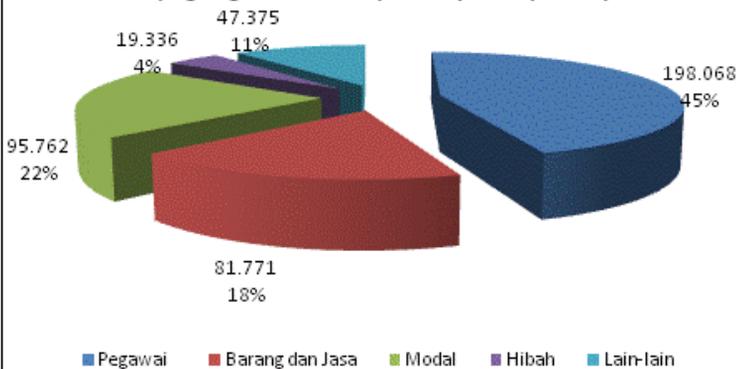
# Belanja Daerah

# Belanja Daerah

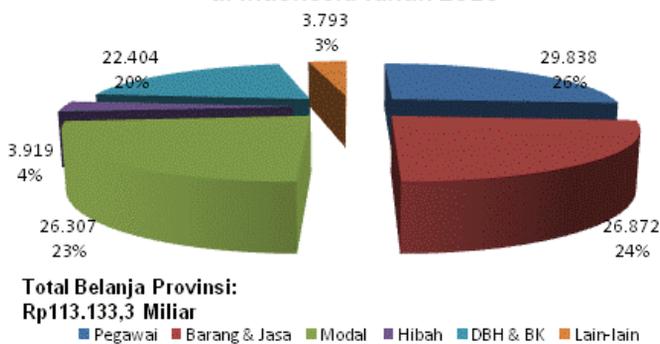
- **Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.**
- **Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.**
- **Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.**
- **Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.**

# Komposisi per Jenis Belanja (dalam miliar rupiah)

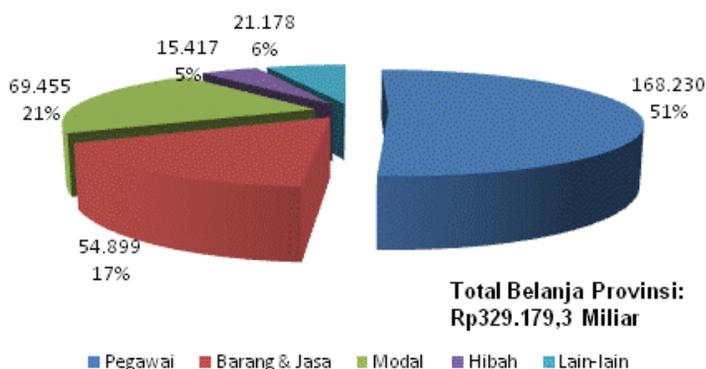
**Komposisi per jenis Belanja Secara Nasional  
(Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)**



**Komposisi Belanja Pemerintah Provinsi  
di Indonesia Tahun 2010**



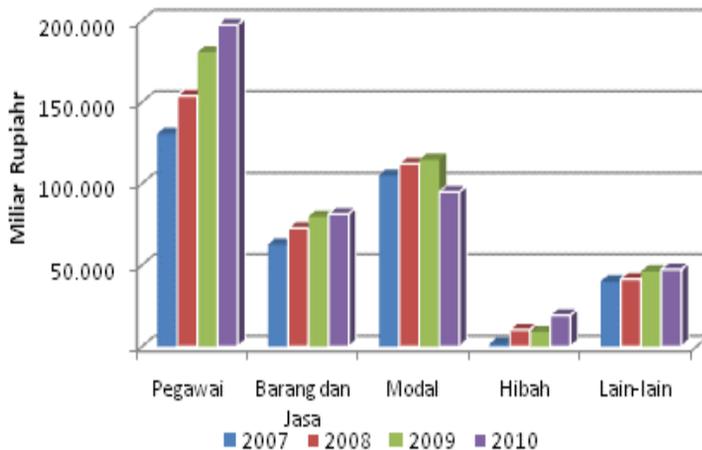
**Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten/  
Kota di Indonesia Tahun 2010 (Nominal)**



- Total Belanja pada APBD 2010 secara nasional mencapai Rp442,3 triliun, yang terdiri dari Rp 113,1triliun Belanja Pemerintah Provinsi (25,6%) dan Rp329,2 triliun Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (74,4%)
- Secara nasional (agregat Prov./Kab./Kota), belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai 45% dari total belanja, diikuti oleh belanja modal 22% dan belanja barang & jasa 18%.
- Komposisi belanja antara Provinsi dengan Kab/kota berbeda secara signifikan. Untuk Provinsi, porsi belanja pegawai, barang & jasa, dan modal relatif hampir berimbang di kisaran 23%-26%, diikuti oleh belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang mencapai 20%.
- Sementara, untuk Kab/Kota, dominasi belanja pegawai sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 51% dari total belanja. Diikuti oleh belanja modal sebesar 21% dan barang dan jasa sebesar 17%.

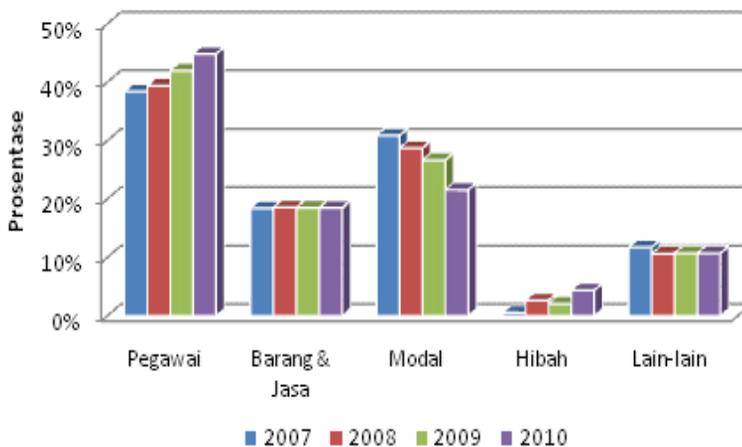
# Tren Belanja APBD 2007-2010 (Agregat Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tren Belanja APBD secara Nasional



- Secara nominal, pada kurun 2007-2010 Belanja Pegawai selalu lebih tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya
- Semua jenis belanja relatif mengalami kenaikan kecuali untuk Belanja Modal tahun 2010 yang mengalami penurunan dari sebelumnya.
- Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berubahnya alokasi DAK Pendidikan Belanja Hibah pada APBD 2010. Selain itu, terdapat pula Belanja Hibah untuk kegiatan pilkada pada 245 pemda yang dialokasikan kepada KPUD dan Panwaslu

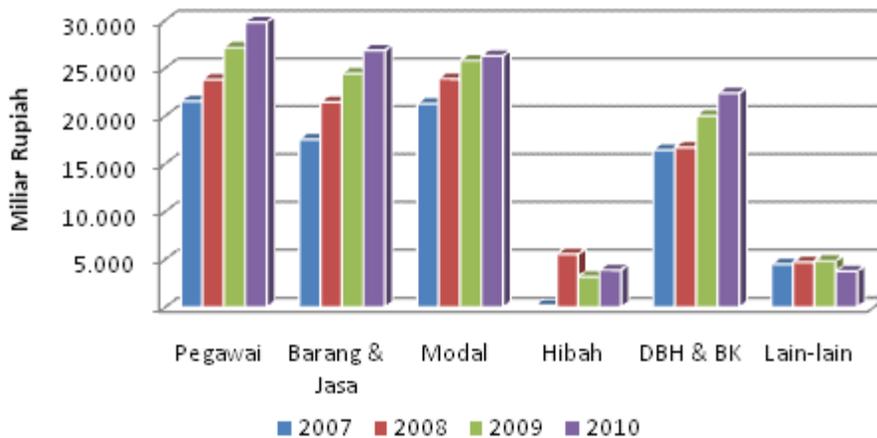
Tren Belanja APBD secara Nasional (%)



- Penurunan belanja modal terlihat semakin jelas apabila dilihat dalam persentase terhadap total belanja APBD.
- Di sisi lain, persentase belanja pegawai naik terus dari tahun ke tahun.
- Sementara belanja barang & jasa dan belanja lain-lain relatif konstan.

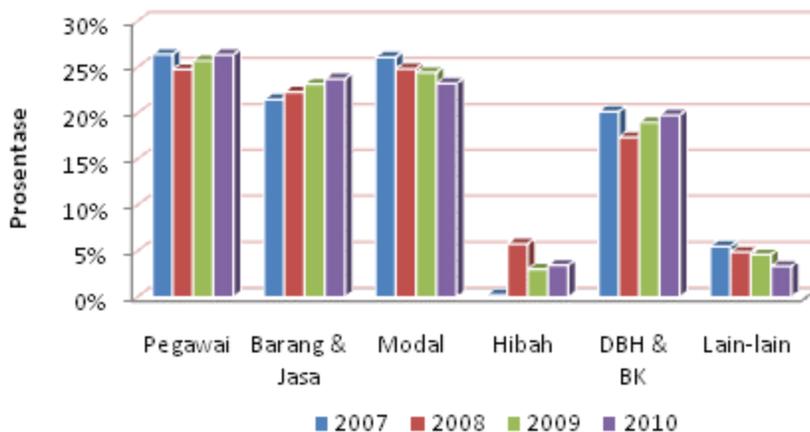
# Tren Belanja APBD 2007-2010 Provinsi

Tren Belanja Provinsi



- Untuk Belanja Daerah Provinsi secara nominal, semua jenis belanja mengalami kenaikan, kecuali Hibah (dari 2008 ke 2009) dan Belanja Lain-lain yang cenderung konstan.
- Belanja pegawai relatif paling tinggi dibandingkan jenis belanja yang lain kecuali untuk tahun 2008, di mana Modal lebih tinggi.

Tren Belanja Provinsi (%)

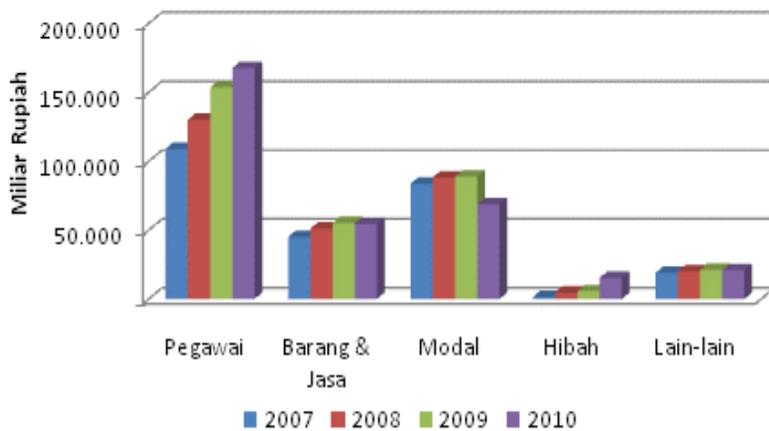


- Meskipun komposisi antara belanja pegawai, barang & jasa, dan modal relatif berimbang, namun terlihat perbedaan tren yang signifikan di antara ketiga jenis belanja tersebut.
- Persentase Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa terhadap Total belanja mengalami tren kenaikan, demikian juga dengan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

- Sementara, porsi belanja modal terhadap total belanja mengalami kecenderungan turun terus menerus

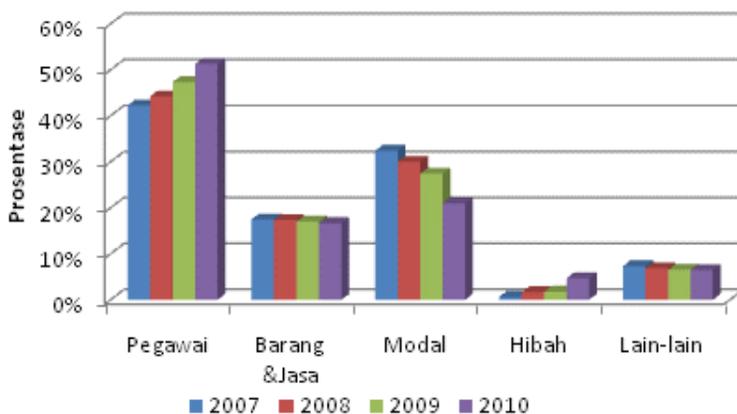
# Tren Belanja APBD 2007-2010 Kabupaten/Kota

Tren Belanja Kabupaten/Kota



- Secara nominal, belanja pegawai di Kab/Kota mengalami kenaikan yang cukup tajam, dari kisaran Rp100 triliun di tahun 2007 menjadi Rp167 triliun di tahun 2010 atau naik hingga lebih dari 65% dalam kurun waktu 4 tahun.
- Di sisi lain, belanja modal justru turun cukup signifikan di tahun 2010 (salah satunya sebagai akibat beralihnya DAK pendidikan sebagai belanja hibah). Belanja Hibah naik cukup signifikan di tahun 2010.
- Sementara untuk belanja barang & Jasa dan Lain-lain relatif konstan.

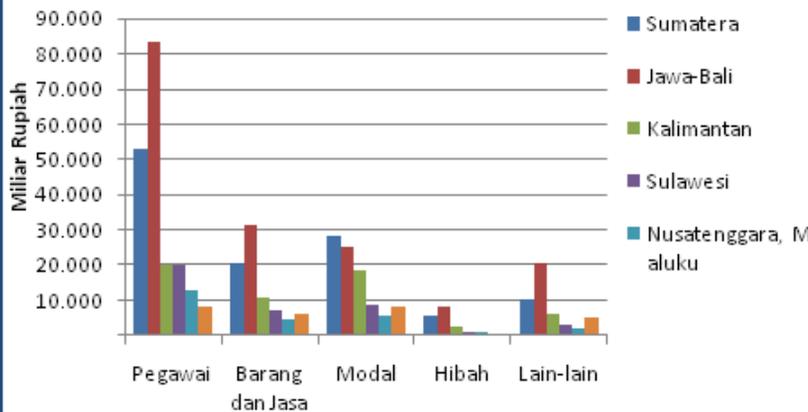
Tren Belanja Kabupaten/Kota (%)



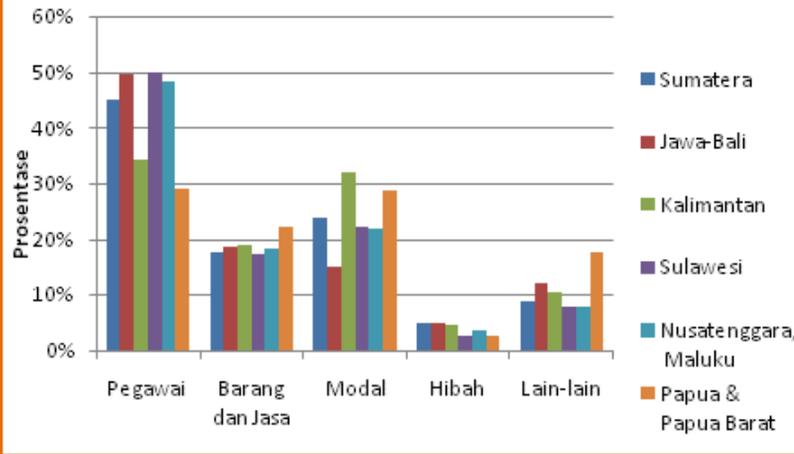
- Pola tren yang hampir sama juga terlihat untuk tren persentase belanja daerah.
- Belanja pegawai mengalami peningkatan porsi yang cukup signifikan terhadap total belanja, sebaliknya belanja modal turun secara nyata dalam 4 tahun terakhir.
- Di sisi lain belanja barang & jasa dan belanja lain-lain cenderung konstan. Sementara untuk hibah naik signifikan di tahun 2010.

# Perbandingan Belanja APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

Komposisi Belanja pada 6 Wilayah (Nominal)



Komposisi Belanja pada 6 Wilayah (%)



- Kecuali Belanja Modal, wilayah Jawa-Bali memiliki belanja dengan nominal terbesar dibandingkan wilayah lainnya. Terutama untuk belanja pegawai terlihat sangat dominan dibandingkan wilayah lainnya.
- Untuk Belanja Modal, ternyata wilayah Sumatera justru mempunyai nominal yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah Jawa-Bali.
- Secara persentase, belanja pegawai sangat dominan di 4 wilayah, yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan Maluku (lebih dari 40% total belanja). Sedangkan belanja modal jauh lebih rendah di kisaran 20%, bahkan di Jawa-Bali hanya berkisar 15%.
- Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Papua-Papua Barat relatif cukup berimbang dengan belanja modalnya (kisaran 30%).
- Belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja lain-lain cenderung setara antar-wilayah, kecuali untuk wilayah Papua-Papua Barat yang belanja barang & jasa dan belanja Lain-lain cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

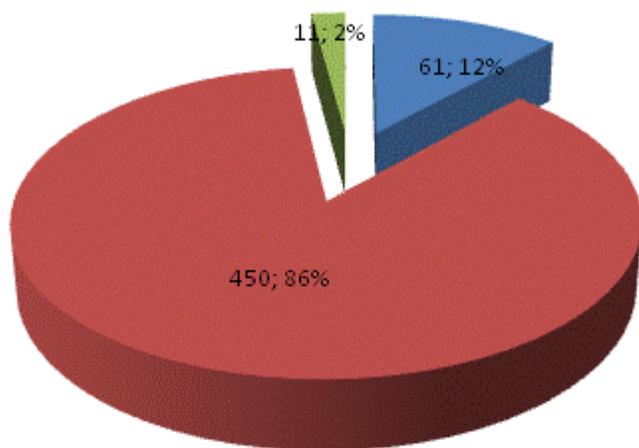
# **SURPLUS/DEFISIT APBD**

# Surplus/Defisit APBD

- Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan adanya surplus atau defisit sedangkan untuk pendapatan dan belanja yang sama dinamakan anggaran yang berimbang.
- Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah dan sebaliknya disebut defisit
- Sebagian besar pemerintah daerah menganggarkan defisit dalam APBD mereka

# Jumlah Daerah Surplus/Defisit/Berimbang

## Proporsi daerah Surplus/Defisit



■ Surplus ■ Defisit ■ Berimbang

- Sebagian besar daerah menganggarkan defisit (450 Daerah atau 86%), hanya 12% Daerah yang menganggarkan surplus.
- Sementara terdapat 11 daerah yang menganggarkan berimbang di tahun 2010.

## 11 Daerah dengan anggaran berimbang

No	Daerah	Provinsi
1	Kab. Aceh Tamiang	NAD
2	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara
3	Kab. Nias Barat	Sumatera Utara
4	Kab. Kuantan Singingi	Riau
5	Kota Sungai Penuh	Jambi
6	Kota Serang	Jawa
7	Kab. Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
8	Kab. Buol	Sulawesi Tengah
9	Kab. Mamberamo Raya	Papua
10	Kab. Tambrau	Papua Barat
11	Kab. Maybrat	Papua Barat

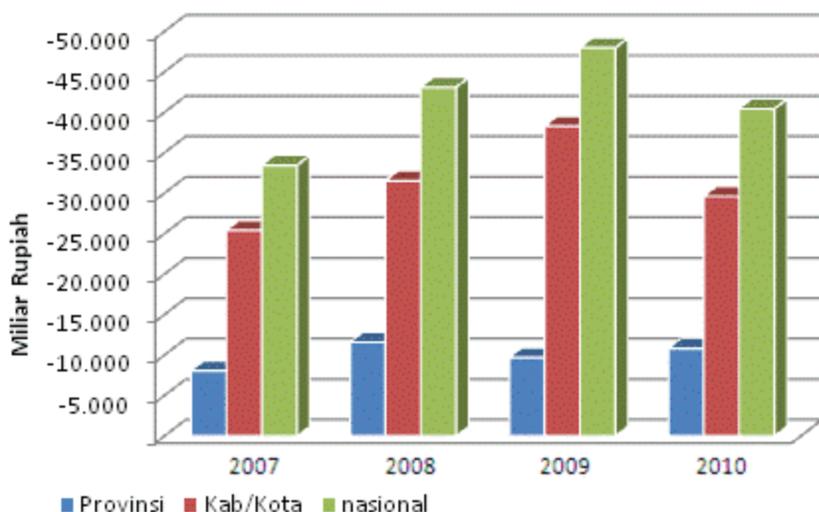
# Daerah yang melebihi batas defisit (dalam miliar rupiah)

No	Daerah	Pendapatan	Penerimaan Pinjaman	% Pinjaman
1	Kab. Penajam Paser Utara	682,0	170,6	25.01%
2	Kab. Mamasa	308,1	63,7	20.66%
3	Kab. Jeneponto	443,6	85,3	19.23%
4	Kab. Jayawijaya	579,5	100,0	17.26%
5	Kota Palopo	354,2	60,6	17.12%
6	Kota Singkawang	393,4	59,2	15.05%
7	Kab. Biak Numfor	522,0	68,6	13.13%
8	Kab. Mamuju	527,9	66,2	12.55%
9	Kab. Tanggamus	516,6	55,0	10.64%
10	Kota Langsa	361,9	37,4	10.33%
11	Kab. Selayar	371,2	28,7	7.72%
12	Kab. Agam	570,8	43,2	7.56%
13	Kab. Halmahera Utara	436,7	30,0	6.87%
14	Kab. Sidenreng Rappang	518,6	34,8	6.71%
15	Kab. Maluku Tenggara Barat	416,7	25,0	6.00%
16	Kab. Muara Enim	932,6	48,6	5.21%
17	Kab. Halmahera Selatan	535,6	25,0	4.67%
18	Kab. Pidie	548,0	25,0	4.56%

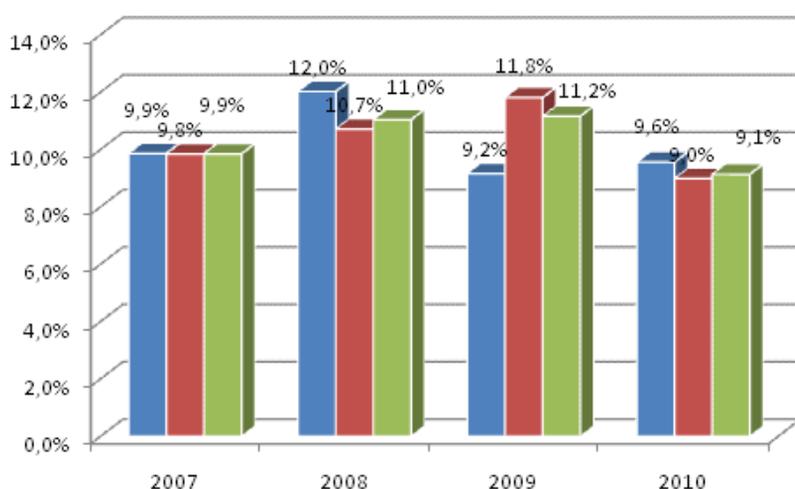
- Dalam PMK 138/PMK.07/2009 yang mengatur mengenai pengendalian defisit daerah telah ditetapkan bahwa batas maksimal defisit daerah yang dibiayai dari pinjaman dan obligasi daerah adalah 4,5% dari total pendapatan.
- Dari 450 Daerah yang menganggarkan defisit terdapat beberapa daerah yang penerimaan pinjaman dan obligasi lebih besar dari 4,5% (18 daerah)

# Tren Defisit APBD 2007-2010

## Tren Defisit APBD (Nominal)



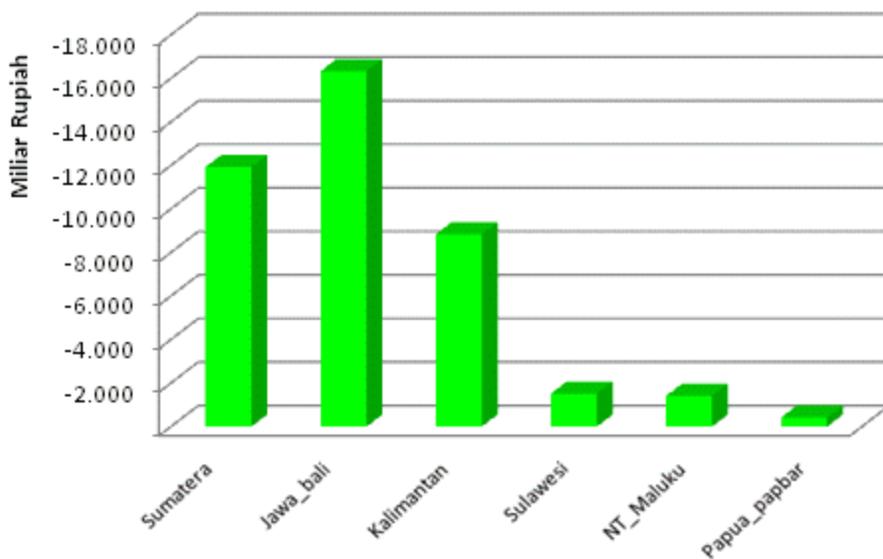
## Proporsi Defisit terhadap Belanja



- Defisit APBD Tahun 2010 secara nasional mencapai Rp40,4 triliun, terdiri dari defisit Provinsi sebesar Rp10,8 triliun dan defisit Kab/Kota Rp29,6 triliun.
- Defisit APBD tahun 2010 secara total nasional lebih kecil dibanding dengan tahun 2009 dan 2008 namun untuk pemerintah Provinsi tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah defisit
- Proporsi defisit terhadap belanja TA 2010 lebih kecil dibandingkan dengan tiga tahun terakhir (2007-2009)

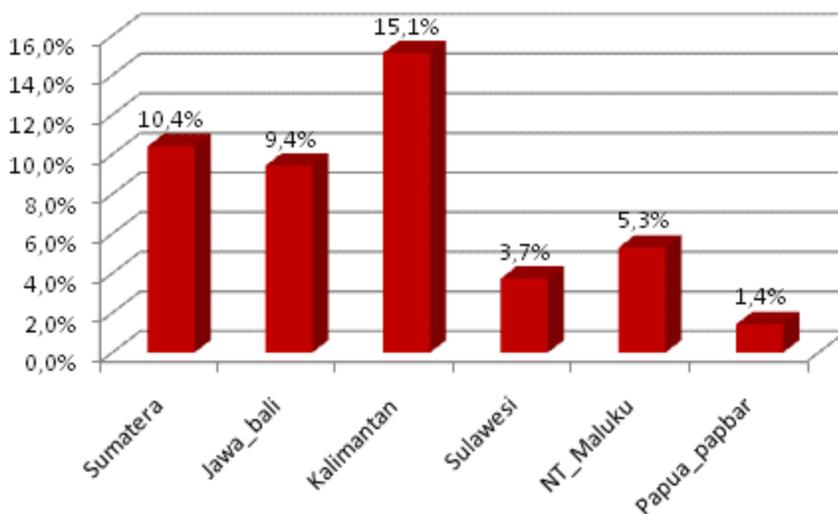
# Perbandingan Defisit APBD pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

## Defisit APBD pada 6 Wilayah (Nominal)



Secara nominal, defisit tertinggi berada pada wilayah Jawa-Bali dan terendah adalah di wilayah Papua-Papua Barat

## Persentase Defisit terhadap Belanja pada 6 Wilayah



- Sedangkan secara persentase terhadap belanja, defisit tertinggi adalah di wilayah Kalimantan, diikuti oleh wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.
- Sebagaimana angka nominal, persentase defisit terendah juga berada di wilayah Papua-Papua Barat.

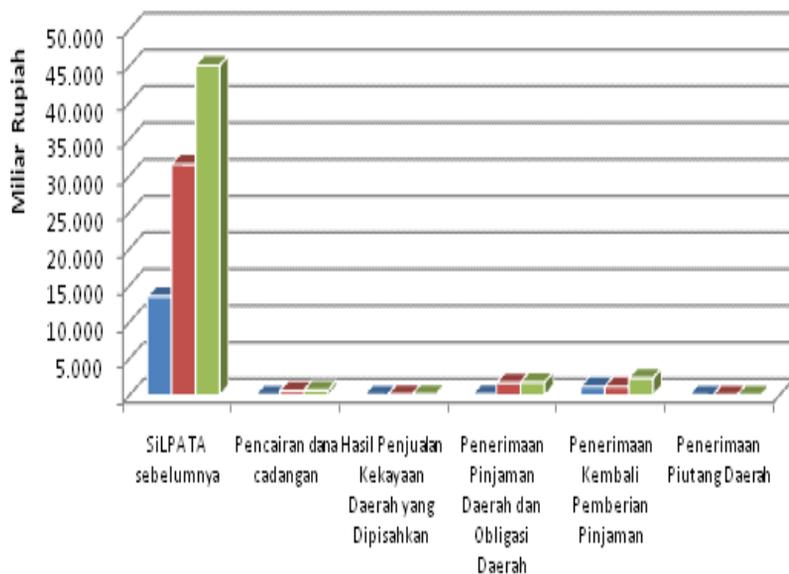
# PEMBIAYAAN DAERAH

# Pembiayaan Daerah

- **Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.**
- **Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.**
- **Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaran pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.**

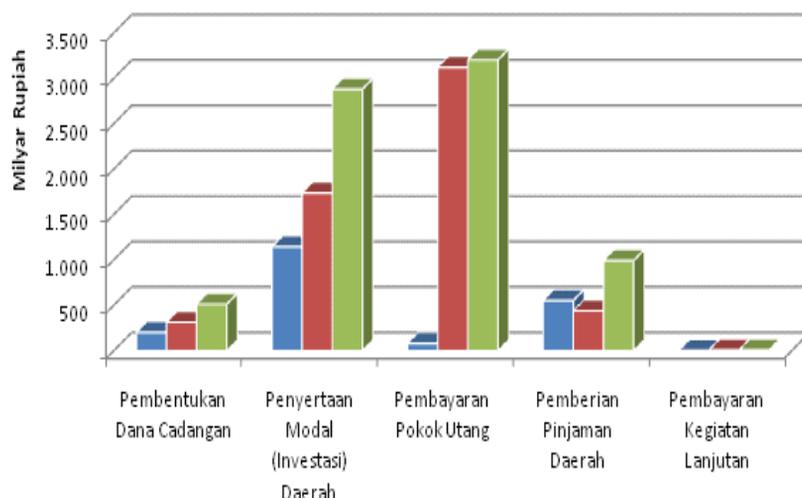
# Komposisi Pembiayaan

## Penerimaan Pembiayaan



- Total Penerimaan Pembiayaan secara nasional adalah sebesar Rp50,2 triliun, sementara Pengeluaran Pembiayaan Rp7,6 triliun, sehingga Pembiayaan Netto sebesar Rp42,6 triliun
- Komposisi Penerimaan Pembiayaan APBD 2010 sangat didominasi oleh SiLPA, baik di level Provinsi maupun Kab./Kota. Secara nasional, SiLPA mencapai Rp45,1 triliun atau 89,8% dari total Penerimaan Pembiayaan. Sementara rencana penarikan pinjaman hanya mencapai Rp1,8 triliun atau 3,5% dari total Penerimaan Pembiayaan.

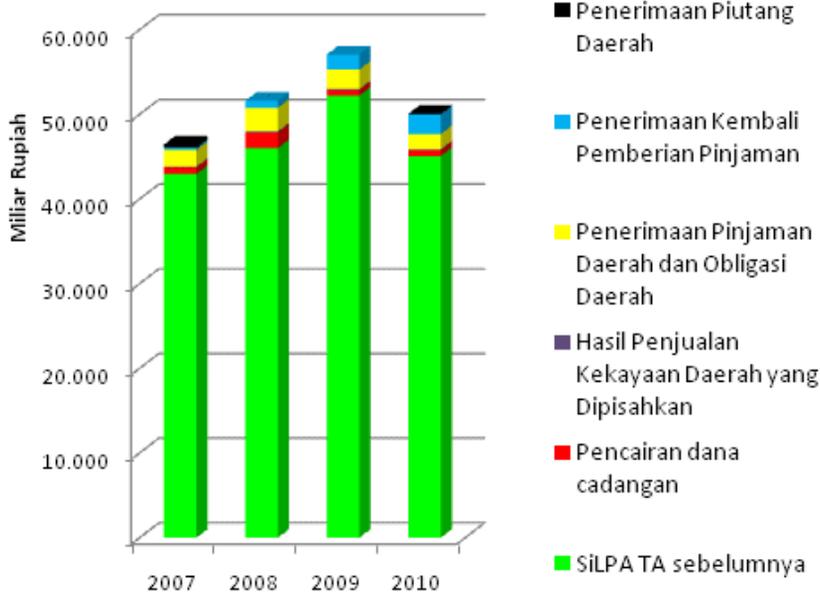
## Pengeluaran Pembiayaan



- Pengeluaran Pembiayaan secara nasional nilai terbesar berasal dari pembayaran pokok utang, yang kedua adalah berasal dari penyertaan modal.
- Pembayaran pokok utang daerah secara nasional mencapai Rp3,2 triliun atau 42,1% dari Pengeluaran Pembiayaan. Sementara penyertaan modal mencapai Rp2,9 triliun atau 38,2%

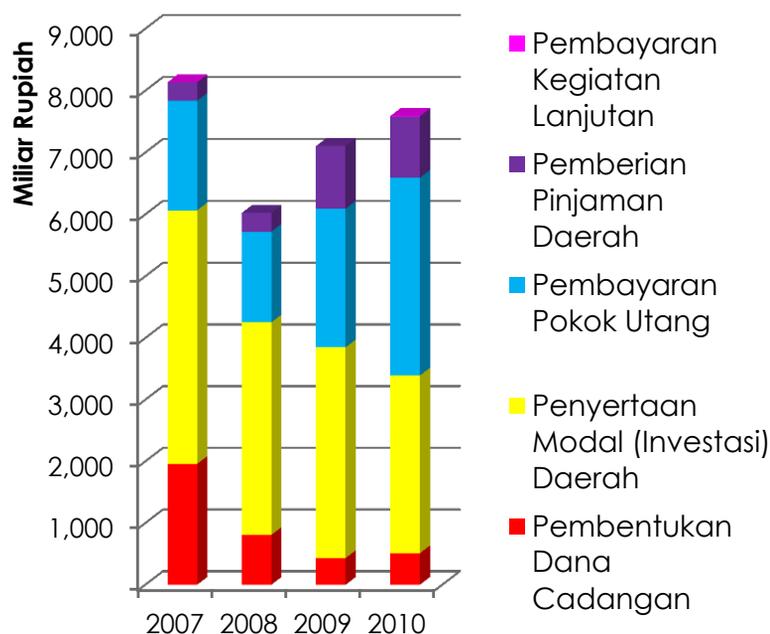
# Tren Pembiayaan APBD Tahun 2007-2010

## Penerimaan Pembiayaan



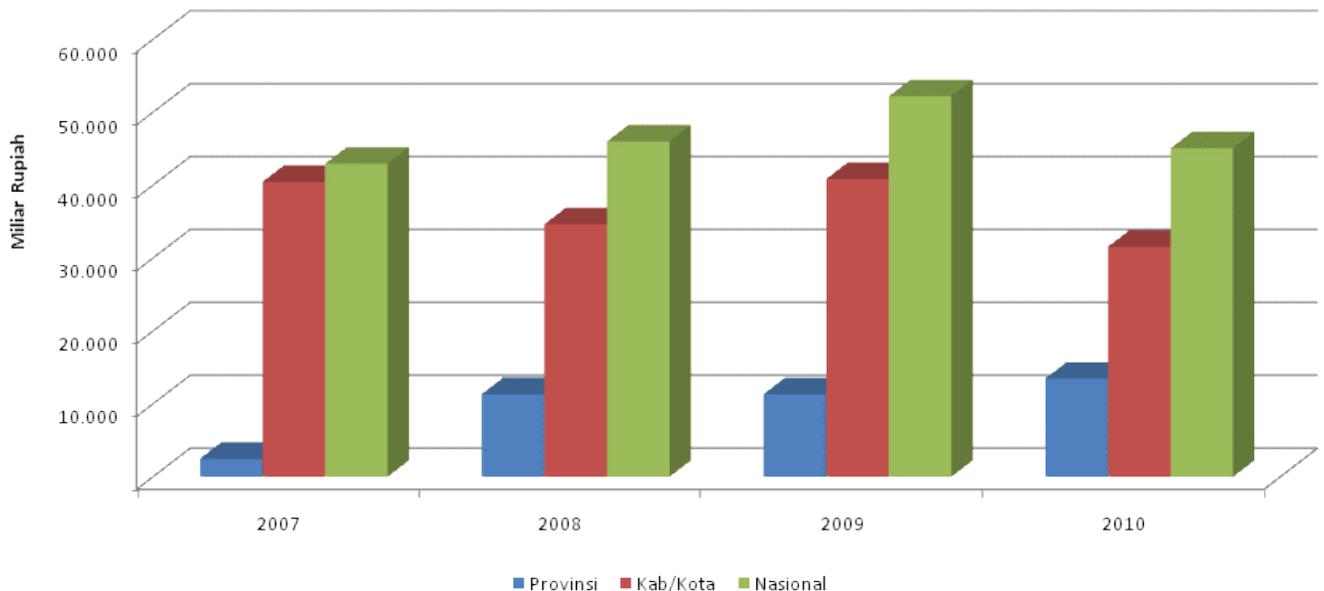
Pada periode tahun 2007-2009, penerimaan pembiayaan mengalami tren naik namun di tahun 2010 penerimaan pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pembiayaan terutama berasal dari penurunan SiLPA yang cukup signifikan.

## Pengeluaran Pembiayaan



Di sisi Pengeluaran Pembiayaan, terlihat adanya tren yang meningkat dari tahun 2008-2010 walaupun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2007. Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan terutama didorong oleh meningkatnya pembayaran pokok utang daerah.

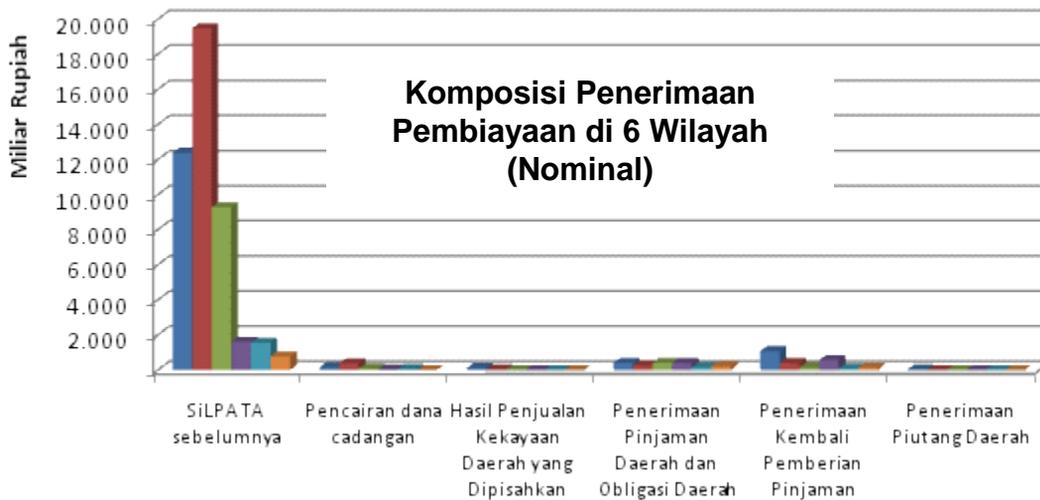
# Tren SiLPA APBD Tahun 2007-2010



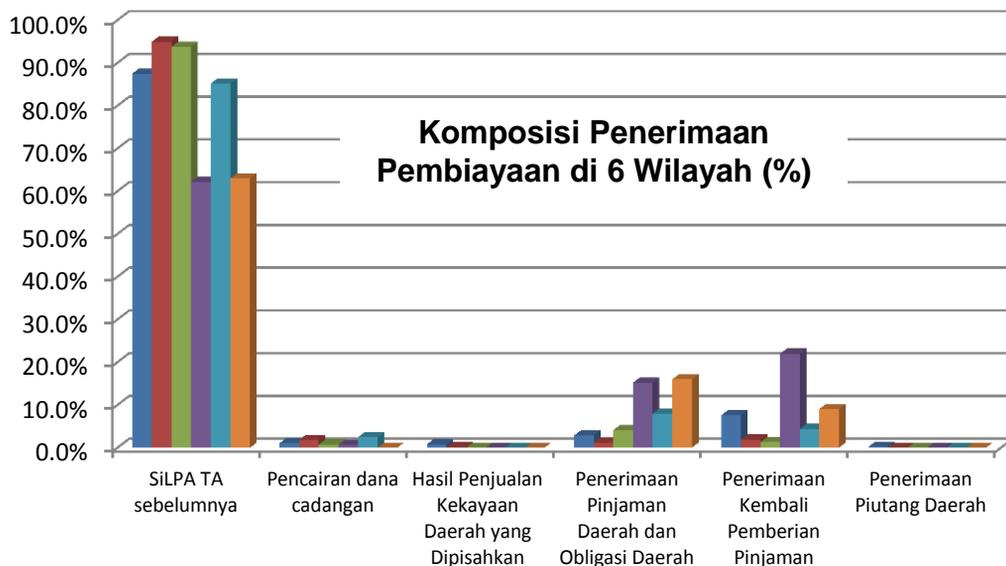
## Note:

1. Nasional = agregat Prov./Kab./Kota
  2. SiLPA adalah SiLPA yang tercatat (dianggarkan) dalam Penerimaan Pembiayaan, yang berarti merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya.
- Total SiLPA yang tercatat pada Penerimaan Pembiayaan APBD secara nasional di Tahun 2010 adalah sebesar Rp45,1 triliun. Turun dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,2 triliun. Secara persentase terhadap volume Belanja APBD, SiLPA juga turun dari 12,2% di tahun 2009 menjadi 10,2% di tahun 2010.
  - Meskipun secara nasional SiLPA yang tercatat di Penerimaan Pembiayaan APBD 2010 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk Provinsi besaran SiLPA terus meningkat dari tahun 2007 hingga tahun 2010.

# Perbandingan Penerimaan Pembiayaan pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)

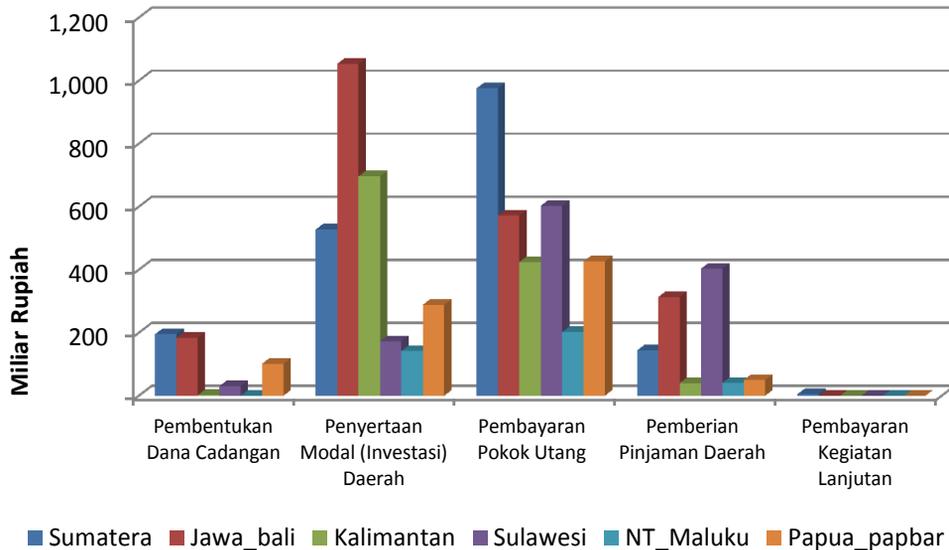


- Secara nominal, wilayah Jawa-Bali mempunyai SiLPA terbesar di APBD 2010, diikuti oleh wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan wilayah Papua-Papua Barat mempunyai SiLPA paling rendah.
- Jenis penerimaan pembiayaan lainnya relatif sangat rendah di seluruh wilayah.

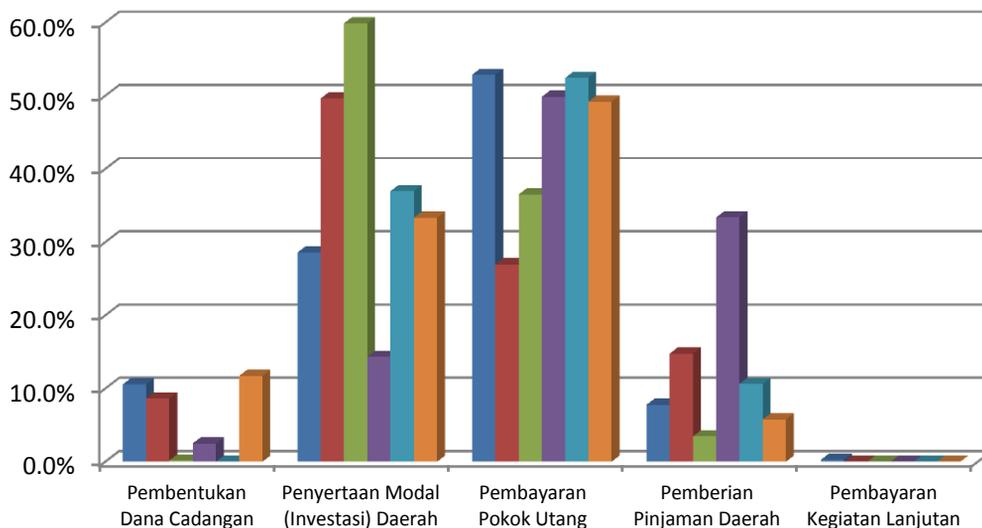


- Secara persentase, besaran SiLPA terhadap total Penerimaan Pembiayaan relatif seimbang di 4 wilayah (Jawa-Bali, Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara-Maluku), yaitu di kisaran 90%. Sementara wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat relatif rendah di kisaran 60%.
- Untuk wilayah Sulawesi dan Papua-Papua Barat, porsi penerimaan pinjaman ternyata cukup signifikan dibandingkan wilayah lainnya, yaitu di kisaran 15% dari total Penerimaan pembiayaan.

# Perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada 6 wilayah (Agregat Prov./Kab./Kota per wilayah)



- Secara nominal pengeluaran pembiayaan untuk wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan yang terbesar adalah untuk penyertaan modal daerah
- Sedangkan untuk wilayah Sulawesi, Sumatera, Papua-Papua Barat, Nusa Tenggara-Maluku Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah pembayaran pokok utang



- Secara persentase, gambarannya hampir sama, yaitu bahwa Pengeluaran Pembiayaan di Jawa-Bali dan Kalimantan sangat didominasi oleh penyertaan modal daerah, bahkan untuk wilayah Kalimantan mencapai hampir 60% dari total Pengeluaran Pembiayaan.
- Sedangkan untuk wilayah 4 wilayah lainnya Pengeluaran Pembiayaan terbesar adalah pembayaran pokok utang

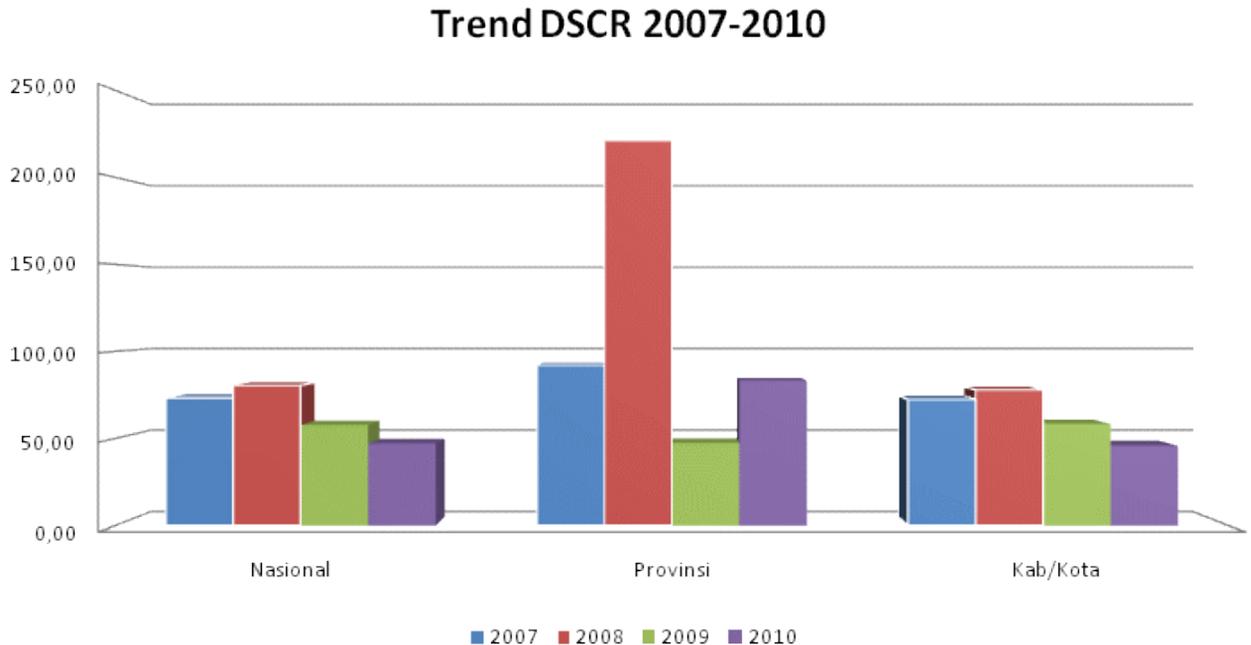
# **INDIKATOR KEUANGAN DAERAH**

# Indikator Keuangan Daerah

- Indikator keuangan daerah dalam tulisan ini merujuk pada besarnya kemampuan/kapasitas fiskal Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah mereka.
- Terdapat beberapa macam indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Dalam tulisan ini digunakan 2 (dua) ukuran, yaitu *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan Ruang Fiskal.
- DSCR pada dasarnya mengukur kemampuan suatu daerah untuk membayar kembali pinjamannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman untuk mendanai kebutuhannya, namun besarnya pinjaman harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah.
- Ruang Fiskal daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

# Debt Service Coverage Ratio

## Trend DSCR 2007-2010



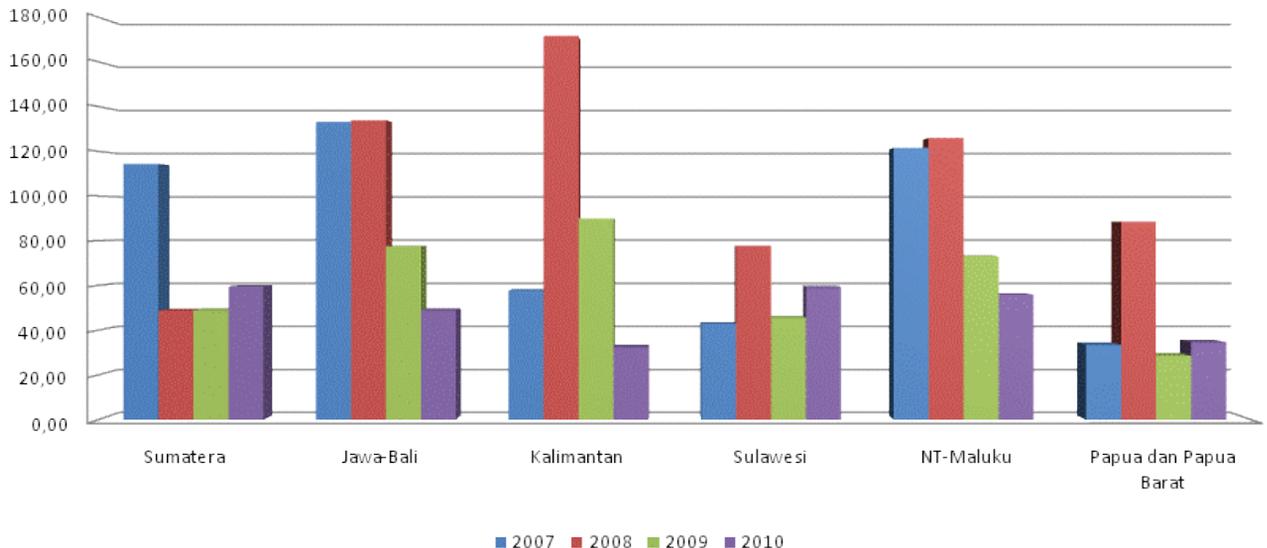
- **Debt Service Coverage Ratio** menunjukkan ketersediaan uang Pemda dalam menutup hutangnya. Batas minimal DSCR adalah 2,5, yang artinya Pemda masih memiliki dana *idle* sebesar 1,5 setelah dikurangi pembayaran atas pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya.
- Rata-rata nasional DSCR 2010 untuk semua daerah yang mempunyai pinjaman sebesar 46,8 sedangkan rata-rata provinsi sebesar 83,5 dan rata-rata kabupaten/kota sebesar 45,8.
- Tetapi bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, hanya Provinsi yang mengalami peningkatan rata-rata DSCR di tahun 2010, sedangkan rata-rata DSCR secara nasional dan Kab./Kota cenderung terus menurun.

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - \text{Belanja Wajib}}{(\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain})}$$

# Debt Service Coverage Ratio

## Trend DSCR 2007-2010 per wilayah

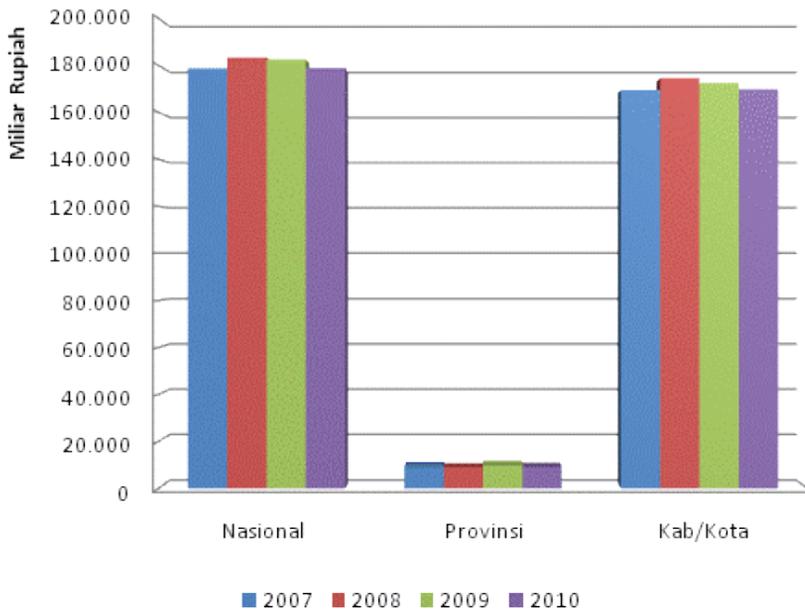
Trend DSCR 2007-2010 Per Wilayah



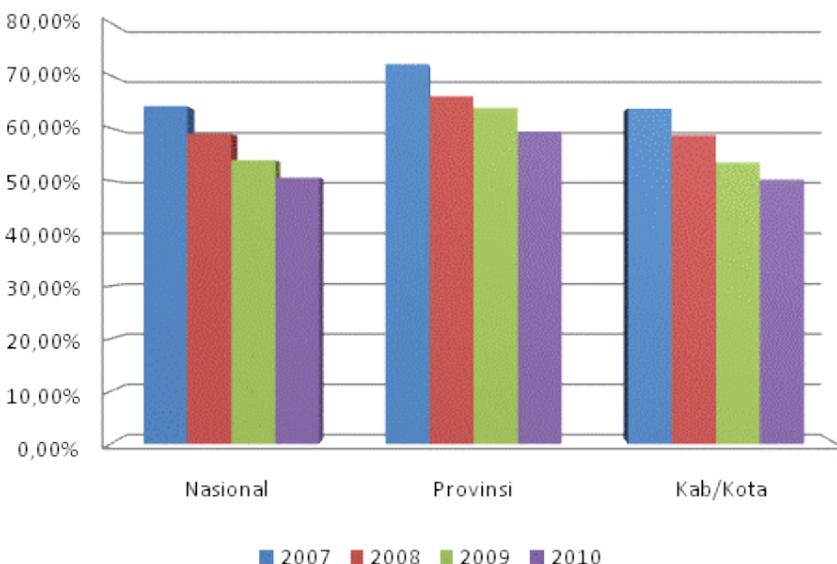
- Bila dibandingkan berdasarkan wilayahnya maka rata-rata DSCR wilayah Kalimantan adalah yang paling rendah yaitu 32,5 dan yang tertinggi adalah wilayah Sumatera yaitu sebesar 59,5.
- Terdapat kecenderungan rata-rata DSCR yang menurun pada wilayah Jawa-Bali, Kalimantan dan Nusa Tenggara-Maluku.
- Sedangkan wilayah Sumatera dan Papua–Papua Barat pada tahun 2010 mengalami peningkatan rata-rata DSCR.

# Indikator Ruang Fiskal Daerah

Trend Ruang Fiskal 2007-2010



Trend Ruang Fiskal 2007-2010  
(Persentase)



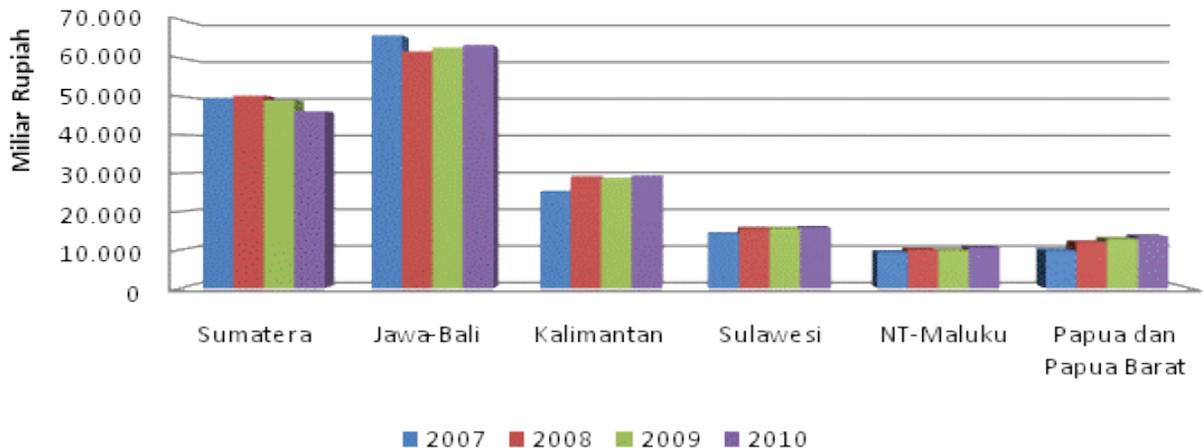
Note:

Ruang Fiskal = Total Pendapatan – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus) – Belanja Pegawai Tidak langsung

- Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemda setelah pendapatan *non earmarked* dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung.
- Secara agregat nasional, maupun di tingkat Provinsi dan Kab./Kota terjadi penurunan ruang fiskal, utamanya dalam persentase (terhadap pendapatan).
- Penurunan Ruang Fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit.

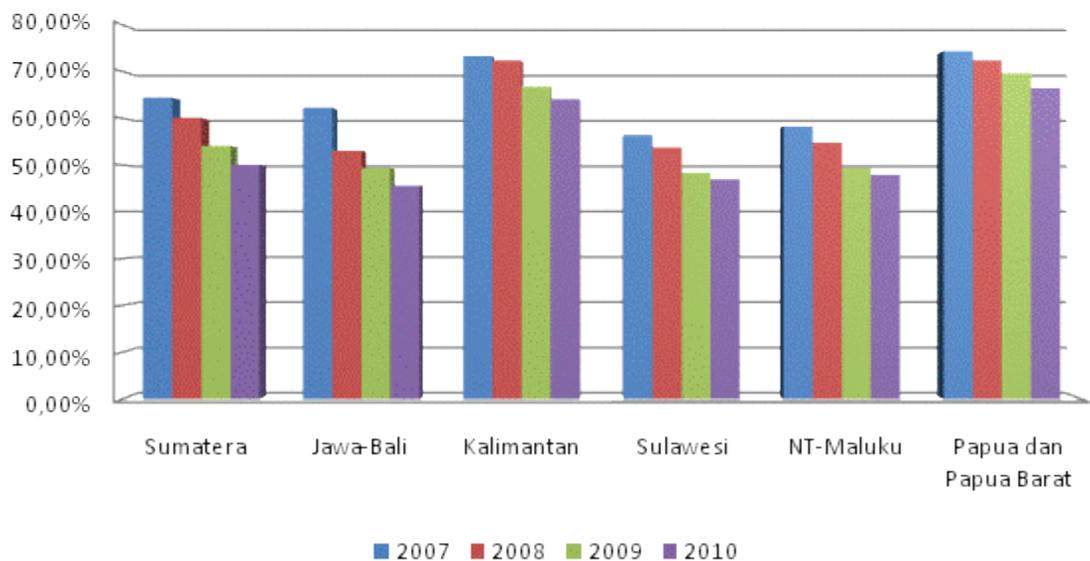
# Indikator Ruang Fiskal Daerah per wilayah

## Trend Ruang Fiskal 2007-2010



Tren ruang fiskal per wilayah secara nominal menunjukkan sedikit peningkatan pada seluruh wilayah kecuali untuk wilayah Sumatera.

## Trend Ruang Fiskal 2007-2010 (Percentage)



- Tetapi tren ruang fiskal per wilayah secara persentase menunjukkan penurunan yang cukup signifikan disemua wilayah.
- Hal ini menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya telah terjadi penurunan kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah di seluruh wilayah.

# Ucapan Terima Kasih

Penyusunan buku “**Deskripsi dan Analisis APBD 2010**” tidak akan terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak yang berperan sehingga apresiasi yang setinggi-tingginya dimanifestasikan dalam ucapan terima kasih berikut ini:

- Ucapan terima kasih ditujukan kepada **Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan** – Prof. DR. Mardiasmo, Ak, MBA dan **Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah** – Drs. Yusrizal Ilyas, MPA yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga diselesaikannya penyusunan buku ini.
- Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Subdirektorat Data Keuangan Daerah** (Edison Sihombing, SE, MT, Siti Mulyanah, Dorlan Festiana, ST, MMgmt, Cornel Theodolus Suot, SE, MM, Nur Ikhsan Ismail, SE, MM dan seluruh rekan DKD) yang telah menyediakan data Ringkasan APBD 2010 melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Selanjutnya terima kasih kepada tim dari **Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah** (Putut Hari Satyaka, SE, MPP, Krisnandar, SE, Nasrullah, SE, Aris Sudjatmiko, S.Sos, Wahyu Widjayanto, SE, MM, Arif Zainuddin Fansyuri, Ak, ME, Dhani Kurniawan, SE, Nanag Garendra Timur, S.Si, Mauliate H. Silitonga, SE, Dastam Wijaya, SIP, Rahmat Saleh, Shinta Theresia, Femmy Ferdiansyah, SH) yang telah melakukan pengolahan data dan sekaligus menyusun buku, melakukan editing hingga melakukan setting layout pencetakan buku ini. Terima kasih atas kerja kerasnya.

# LAMPIRAN